

DAFTAR PUSTAKA

Literatur/Buku:

- Adhyanti. 2014. *Buletin Eksepsi PK dalam Hukum Acara Pidana (kepastian hukum versus keadilan)*. Makassar: Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Universitas Hasanuddin.
- Adji, Seno dan Indriyanto. 2012. *Korupsi dan Permasalahannya*. Jakarta: Diadit Media.
- Ali, Zainuddin. 2014 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, S.M. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- B.M., Pontang Moerad. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung: P.T. Alumni.
- Chazawi, Adami. 2008. *Kemahiran dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana (II)*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Darmohardjo, Dardji dan Shidarta. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djamali, Abdoel. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Presda.
- Erwin, Moh. 2011. *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hamzah, Andi. 2002. *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

- _____. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2012. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2014. *Kekuasaan Mahkamah Agung; Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hulukati, Hj. Tien S. dan Gialdah Tapiansari B. 2006. *Hukum Pidana Jilid 1*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Husin, Kadir dan Budi Rizki Husein. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2014. *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*. Jakarta: Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Koro, M. Abdi. 2012. *Dissenting Opinion Merupakan Salah Satu Wujud Kemandirian Hakim*. Jakarta: Varia Peradilan No. 323.
- Latief, Mujahid A. 2007. *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Lubis, Fauziah. 2019. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV. Manhaji.
- Mahkamah Agung. 2015. *Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia.
- Makarao, M. Taufik dan Suhasril. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Manan, Bagir. 2006. *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jakarta: Varia peradilan.
- Margono. 2012. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi ketujuh*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 2009. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti.
- _____. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.
- _____. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Karim. 2004. *Dengan Pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Masalah Hukum Acara Pidana*. Jakarta: DPR.
- Pompe, Sebastiaan. 2012. *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan.
- Prahassacitta, Vidya. 2017. "Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penyuaan di Sektor Privat dalam hukum Nasional Indonesia: Suatu

Perbandingan dengan Singapura, Malaysia dan Korea Selatan”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 47(4): 403.

Projohamidjojo, Martiman. 2002. *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan, Kumpulan Karangan Buku Kelima*. Jakarta: Pusat pelayanan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI.

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soemadipraja, Ahmah S. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.

Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.

Sofyan, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education.

Syamasudin, Amir. 2008. *Integritas Penegak Hukum*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Wantjik, K. 2002. *Tindak Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wiyono, R. 2008. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zulkarnain. 2013. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press.

Peraturan Perundang-undangan:

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

_____. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

_____. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

_____. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana

Suap

Jurnal:

Anggraini, Ravica Setia dkk. 2013. “Kesesuaian Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Korupsi Dan Pemerasan Dengan Ketentuan Pasal 263 KUHAP”. *Jurnal Verstek*. 1(3): 93

Anggraeny, Kurnia Dewi. 2016. “Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikitropika di Pengadilan Negeri Sleman”. *Jurnal Hukum Novelty*. 7(2): 234.

A'yun, Afiyah Qurrota dkk. 2019. “Dissenting Opinion Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Merek Terkenal Yumi Katsura dan Prada”. *Journal of Legal Research*. 1(1): 172

Brata, Desak Paramita dkk. 2020. “Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana”. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*. 3(1): 81.

Chakim, M. Luthfi. 2015. “Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Obtain Justice Through Extraordinary Legal Remedies Reconsideration after The Decision of The Constitutional”. *Jurnal Konstitusi*. 12(2): 338.

Dewi, Ni Luh Kadek Rai Surya dan I Dewa Made Suartha. 2016. “Nilai-nilai Positif dan Akibat Hukum Dissenting Opinion dalam Peradilan Pidana di Indonesia”. *E-journal Ilmu Hukum Kerta Wicara*. 05(3): 4.

Gulo, Nimerodi dan Ade Kurniawan Muharram. 2018. “Disparitas dalam Penjatuhan Pidana”. *Masalah-Masalah Hukum*. 47(3): 216.

Gumbira, Seno Wibowo dkk. 2016. “Problematika Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca SEMA Nomor 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis dan Asas-Asas dalam Peradilan Pidana). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 46(1): 107.

- Hariyanti, Ani dkk. 2015. "Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Dinamika Sosial*. 17(2): 198-209.
- Harsandini, Diska. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang". *Jurnal Verstek*. 5(2): 249-250.
- Harsanto, Adi dkk. 2017. "Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". *2 e Jurnal Katalogis*. 5(3): 5.
- Hidayat, Ahmad Arif dkk. 2017. "Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas oleh Jaksa Agung dalam Proses Peradilan Pidana". *Diponegoro Law Journal*. 6(2): 8.
- Hikmawati, Puteri. 2015. "Kontroversi Surat Edaran Mahkamah Agung Mengenai Pengajuan Peninjauan Kembali Satu Kali". *Buletin Info Hukum Singkat Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI*. 7(1): 3.
- Indarsih, Yuli. 2017. "Dampak SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013". *Law Enforcement: Jurnal Ilmu Hukum*. 8(1): 7.
- Kharismawan, Resdian Wisudya dan Sri Endah Wahyuningsih. 2017. "Kebijakan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Tipikor/2015/PT.Bdg)". *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. 12(3): 492-493.
- Lalamentik, Einstein E. 2018. "Peninjauan Kembali oleh Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *Lex Administratum*. 6(3): 14.
- Muhlizi, Arfan Faiz. 2015. "Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana yang Berkeadilan". *Jurnal Yudisial*. 8(2): 155-156.
- Pah, Gress Gustia Adrian dkk. 2014. "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana oleh Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor: 2031 K/PID.SUS/2011)". *E-journal Lentera Hukum*. 1(1): 34.
- Pande, Yohanes. 2011. "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Suap dalam Bidang Politik". *Jurnal Law Reform*. 6(2): 167.
- Pelafu, Fiona L. 2017. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Lex Crimen*. 6(3): 87.
- Prajatama, Hangga. 2014. "Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia". *Jurnal Verstek*. 2(1): 47-48.

- Pratama, Gilang Eka. Hibnu Nugroho dan Rani Hendriana. "Penolakan Status Justice Collaborators Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Andi Narogong Oleh hakim Tingkat Banding (Studi Perbandingan Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JktPst dan Purusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI)". *Jurnal S.L.R.* 1(1): 185-186.
- Pratomo, Bondan dan Ghufron Eko Nugroho. 2014. "Kesesuaian Novum Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan". *Jurnal Verstek.* 2(1): 14.
- Prayogo, R. Tony. 2016. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang". *Jurnal Legislasi Indonesia.* 13(2): 192.
- Putra, Nugraha Azel. 2016. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 122/Pid.B/2005/PN.PYK Dengan Putusan Nomor 57/PID/2006/PT.PDG". *JOM Fakultas Hukum.* 3(1): 13.
- Qibtiyah, Devita Nur Muzdhalifatul, Uu Idjuddin Solihin dan Oci Senjaya. 2020. "Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur". *Singaperbangsa Law Review (SILREV).* 1(1): 83.
- Raharjo, Agus dan Angkasa. 2011. "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas". *Mimbar Hukum.* 23(1): 239.
- Ridwansyah, Muhammad. 2016. "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh". *Jurnal Konstitusi.* 13(2): 284.
- Sagama, Suwardi. 2016. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam Mazahib.* 15(1): 28.
- Setiawan, Ahmad Nur. 2018-2019. "Hak Tersangka Menuntut Ganti Kerugian Atas Penahanan yang Tidak Sah". *DiH Jurnal Ilmu Hukum.* 14(28): 67
- Setyono, Yoni A. 2019. Tinjauan Novum dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan.* 49(1): 138.
- Silviana dan Sonia Yanarika Widyahayu. 2016. "Analisis Terhadap Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dengan Alasan Adanya Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 91 PK/Pid/2014)". *Jurnal Verstek.* 4(2): 19.

- Soediro. 2019. “Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat dengan Peradilan Pidana di Indonesia”. *Jurnal Kosmik Hukum*. 19(1): 53-54.
- Sumandag, Fensky Readel. 2019. “Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Berdasarkan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013”. *Lex Crimen*. 8(6): 32
- Susanti, Heni dan Ferry Adi Fransista. 2019. “Dissenting Opinion dalam Menentukan Batas Umur Anak”. *Jurnal Yudisial*. 12(3):349.
- Triwati, Ani dkk. 2015. “Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. *J. Dinamika Sosbud*. 17(2): 206.
- Wahyu, Yuyu. 2014. “Perkembangan Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Adliya*. 8(1) 122.
- Wattimena, Husin. 2016. “Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”. *Jurnal Tahkim*. 12(2): 3.

Makalah

- Barda Nawawi Arief, *Pokok-pokok pikiran Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, Makalah, hlm. 3.

